

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN BUOL

Sofyan A. Jusuf^{1*}, Sri Yanti UM. Armin², Runi Rizkiana³, Rusli Dunggio⁴

^{1,2,3,4}STISIPOL Mujahidin;

sofyanjusufmsi@gmail.com; yantistisipol1983@gmail.com; runirizkhiana@gmail.com; liirusli349@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of household waste management policy by the Environmental Agency in the urban area of Buol Regency and its relevance to sustainable economic development. A descriptive qualitative approach was applied using in-depth interviews, field observations in Biau District, and documentation of government performance reports. The analysis employed George C. Edwards III's framework consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that policy implementation has not been effective. Public communication remains limited, transportation fleets and operational budgets are inadequate, implementers tend to work reactively within a collect-transport-dispose paradigm, and institutional coordination is fragmented. These weaknesses generate environmental and economic externalities, including reduced urban service quality, higher public health risks, inefficient public expenditure, and unrealized opportunities for recycling-based local economic activities. Strengthening community participation, modernizing infrastructure, integrating inter-agency coordination, and developing waste banks and circular-economy partnerships are required so that waste management contributes to urban productivity, employment creation, and sustainable regional development.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Sustainable Economic Development, Circular Economy, Buol Regency*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah perkotaan Kabupaten Buol serta relevansinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan di Kecamatan Biau, dan studi dokumentasi laporan kinerja pemerintah. Analisis menggunakan model George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum efektif. Komunikasi publik masih terbatas, armada dan anggaran operasional belum memadai, pelaksana cenderung reaktif dalam paradigma kumpul-angkut-buang, serta koordinasi kelembagaan masih terfragmentasi. Kondisi tersebut menimbulkan eksternalitas lingkungan dan ekonomi berupa penurunan kualitas layanan perkotaan, meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, ketidakefisienan belanja publik, serta belum optimalnya peluang ekonomi lokal berbasis daur ulang. Penguatan partisipasi masyarakat, modernisasi infrastruktur, integrasi koordinasi antarlembaga, serta pengembangan bank sampah dan kemitraan ekonomi sirkular diperlukan agar pengelolaan sampah berkontribusi terhadap produktivitas perkotaan, penciptaan kerja, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Ekonomi Sirkular, Kabupaten Buol*

Received: 04 Juni 2026

Revised: 05 Juni 2026

Accepted: 06 Juni 2026

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin mendesak di Indonesia akibat bertambahnya penduduk perkotaan yang berakibat jumlah sampah meningkat, sampah yang tidak terkelolah tentu akan memicu

pencemaran lingkungan dan kesehatan, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunkan kualitas hidup di wilayah perkotaan, sementara pemerintah telah menetapkan kerangka hukum nasional untuk mengatasi permasalahan ini dengan menekankan prinsip pengurangan dan

penanganan sampah secara bertanggung jawab sejak dari sumber (Manalu et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam mengurangi dan menangani sampah rumah tangga sejak dari sumbernya, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah di tingkat kabupaten. (Junaidi, 2024).

Fenomena peningkatan timbulan sampah telah menjadi isu strategis yang menuntut penanganan serius, terutama di kawasan padat penduduk seperti Kecamatan Biau. Data resmi menunjukkan adanya lonjakan laporan timbulan sampah yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2024 tercatat angka sebesar 54.982 ton, sebuah peningkatan drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 21.977 ton. Lonjakan data ini mengindikasikan adanya tekanan besar terhadap infrastruktur pengangkutan dan pemrosesan akhir, yang jika tidak dikelola dengan kebijakan yang implementatif, akan memicu krisis kesehatan lingkungan di wilayah perkotaan (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, 2024).

Di Kabupaten Buol, Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor bertanggung jawab terhadap kebijakan sampah di wilayah perkotaan, di mana evaluasi kualitas infrastruktur permukiman pesisir perkotaan Kelurahan Buol menunjukkan bahwa komponen pengelolaan sampah dan limbah memperoleh skor rata-rata 2,33 yang tergolong rendah, sehingga menandakan bahwa upaya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan kabupaten ini belum optimal dan memerlukan peningkatan yang lebih terstruktur meskipun infrastruktur lain seperti pendidikan, kesehatan, jaringan jalan, dan listrik mendapat penilaian lebih baik dengan rata-rata keseluruhan 3,68 (Basri et al., 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan dan pengelolaan limbah rumah tangga di berbagai daerah terdapat kendala serupa seperti

kapasitas SDM dan keuangan yang kurang, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pemilahan sampah dari sumber, sehingga penerapan penanganan sampah di Kota Depok dinilai masih belum efektif akibat faktor-faktor tersebut (Prayudha & Rajab, 2025).

Studi lain menemukan bahwa meskipun kebijakan telah dibuat dengan baik, faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan infrastruktur pendukung 3R menyebabkan implementasi belum efektif meskipun volume sampah terus meningkat, sehingga kebijakan pengelolaan persampahan sampah rumah tangga di Kota Baubau masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan di lapangan karena pengorganisasian sudah dilakukan namun pelaksanaan tugas kurang sesuai SOP dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah masih rendah (Ali, 2025). Di wilayah Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Buol, data sampah tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Buol memiliki jumlah sampah terkelola yang relatif rendah dibandingkan kabupaten lain di provinsi tersebut, sehingga pola pengelolaan yang masih dominan open dumping dan keterbatasan sarana menjadi tantangan utama yang perlu dikaji lebih mendalam (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, 2024).

Meskipun terdapat beberapa penelitian tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Buol dan daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah, kajian yang secara khusus menganalisis proses penanganan sampah rumah di wilayah perkotaan pada periode terkini masih sangat terbatas. Sebagian besar studi terdahulu lebih berfokus pada gambaran umum sistem persampahan, volume timbulan sampah, atau kondisi infrastruktur tanpa menekankan variabel-variabel implementasi kebijakan publik seperti aspek komunikasi, dukungan sumber daya, komitmen pelaksana, dan koordinasi antar organisasi. Kondisi tersebut menciptakan celah pengetahuan yang signifikan, terutama mengingat dinamika perkembangan wilayah perkotaan Buol yang semakin meningkat serta adanya berbagai inisiatif kebijakan baru dari pemerintah daerah.

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak dilakukan karena dapat memberikan gambaran empiris terkini mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat kabupaten, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang spesifik di wilayah perkotaan. Urgensi semakin tinggi mengingat tingginya jumlah timbulan sampah rumah tangga yang terus bertambah belum didukung oleh sistem pengelolaan yang memadai, sehingga dapat memicu dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus lokus yang lebih spesifik yaitu wilayah perkotaan Kabupaten Buol serta penggunaan pendekatan analisis implementasi kebijakan publik yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor utama. Pendekatan ini belum banyak dikaji secara mendalam dibandingkan studi-studi sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif umum atau dilakukan di lokasi lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup di wilayah perkotaan Kabupaten Buol, secara khusus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi tersebut serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di masa mendatang.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pengelolaan sampah bukan hanya layanan lingkungan, tetapi bagian dari infrastruktur dasar yang memengaruhi produktivitas wilayah, kesehatan tenaga kerja, daya tarik investasi, kualitas permukiman, dan efisiensi belanja pemerintah. Timbulan sampah yang tidak tertangani menimbulkan eksternalitas negatif karena biaya pencemaran dan kesehatan ditanggung oleh masyarakat, sedangkan sampah yang dipilah dan diolah dapat menjadi sumber nilai tambah melalui bank sampah, usaha daur ulang, kompos, dan penciptaan lapangan kerja hijau. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan persampahan perlu dinilai bukan hanya dari kebersihan visual, tetapi juga dari kontribusinya terhadap

pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan publik menjadi landasan utama dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga. Model George C. Edwards III merupakan salah satu kerangka paling komprehensif karena menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi di lapangan (Namira & Azhar, 2025). Model ini sangat relevan diterapkan pada konteks Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor dan bergantung pada SDM yang kompeten serta fasilitas pendukung seperti kendaraan pengangkut yang memadai (Sakir, 2023). Van Meter dan Van Horn melengkapi analisis dengan menekankan bahwa proses implementasi kebijakan memerlukan dukungan kuat baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Afandi, Mangngasing, & Nuraisyah, 2024).

Teori Merilee S. Grindle memberikan perspektif yang lebih luas dengan membagi analisis menjadi dua dimensi utama yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan, termasuk kapasitas pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengurangan sampah (Tiansyah & Rahayu, 2025). Ketiga teori ini saling melengkapi dalam konteks wilayah perkotaan karena Edwards III lebih menyoroti faktor internal organisasi pelaksana, sedangkan Grindle menekankan faktor eksternal seperti budaya masyarakat dan keterbatasan infrastruktur 3R (Erlianti et al., 2025). Teori-teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menjalankan kebijakan secara efektif di tingkat kabupaten.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan model Edwards III. Penelitian di Kota Palu menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah sudah berjalan cukup baik secara umum, namun penyampaian informasi dan kejelasan kebijakan kepada masyarakat masih belum efektif serta anggaran dana operasional yang tersedia belum mencukupi (Siti, Susanti, & Hamid, 2024). Di Kabupaten Kepulauan

Sangihe, analisis dengan model Edwards III menunjukkan bahwa implementasi belum optimal karena adanya ketidakserasian antara pelaksanaan program di tingkat dinas dengan pelaksanaan di tingkat kelurahan serta keterbatasan jumlah staf pada posisi strategis seperti pemantauan lingkungan (Takaluhude, Gosal, & Kasenda, 2022). Studi di Kabupaten Sumbawa menggunakan kerangka kebijakan serupa mengungkap bahwa efektivitas penanganan sampah belum sepenuhnya tercapai akibat kurangnya sarana pengangkutan yang tidak sebanding dengan volume timbulan sampah harian serta belum adanya penindakan sanksi yang tegas bagi para pelanggar aturan (Edrial, Ramdani, & Salahuddin, 2025).

Penelitian di Desa Panangkalaan menemukan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga belum berjalan efektif karena terkendala oleh jadwal pengangkutan yang tidak menentu serta minimnya alokasi anggaran untuk upah petugas pelaksana (Radhi, Raudah, & Jumaidi, 2025). Di Kota Palu, analisis menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif secara umum sudah berjalan dengan baik meskipun dalam prosesnya masih ditemui hambatan berupa keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana penunjang (Sulaiman, 2023). Di Kota Mataram, hambatan utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan yang berkelanjutan berupa kinerja pelayanan yang masih kurang sesuai serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (Al-Giffari, Yudana, & Suminar, 2023).

Ulasan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan landasan bahwa penanganan sampah rumah tangga di Indonesia umumnya masih menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat (Hafizah, Dharma & Paulina, 2025). Secara keseluruhan, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai model teori telah banyak diterapkan, penerapannya di wilayah perkotaan kabupaten kecil masih memerlukan analisis yang lebih kontekstual (Aditya, Nurdin & Asropi, 2025).

Keberhasilan strategi pelayanan publik tidak hanya bergantung pada pemanfaatan

teknologi digital, tetapi juga sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi, kapasitas sosial, serta komitmen politik yang kuat. Implementasi pelayanan di lapangan memerlukan keseimbangan antara penyediaan teknologi mutakhir dengan pemberdayaan sumber daya manusia agar tercipta sistem layanan yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan geografis di daerah (Adzam, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara jelas fenomena pengelolaan sampah di Kabupaten Buol. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling agar data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak yang tepat, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, petugas lapangan, dan masyarakat di Kecamatan Biau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap fasilitas persampahan, serta studi dokumen laporan pemerintah daerah. Peneliti menjadi instrumen utama dibantu dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Keabsahan data dicek dengan triangulasi sumber dan teknik agar data yang diperoleh lebih akurat dan konsisten. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini beranggapan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang berjalan efektif.

Untuk memperkuat keterkaitan dengan ekonomi pembangunan, interpretasi hasil juga diarahkan pada dampak kebijakan terhadap efisiensi pelayanan publik, biaya sosial lingkungan, peluang ekonomi sirkular, produktivitas wilayah perkotaan, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Analisis tersebut tidak menambahkan data kuantitatif baru, melainkan menafsirkan temuan lapangan berdasarkan konsekuensi ekonomi dari kualitas implementasi kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Komunikasi yang dibangun oleh Dinas teknik dalam mengimplementasikan penanganan sampah rumah tangga masih bersifat administratif-internal. Berdasarkan wawancara dengan informan kunci dan pengamatan langsung di Kecamatan Biau, instruksi pengangkutan sampah tersampaikan

dengan baik dari pimpinan kepada petugas lapangan. Namun, pengamatan peneliti menemukan fakta bahwa komunikasi kepada masyarakat selaku target kebijakan masih sangat minim. Tidak ditemukan adanya media sosialisasi yang masif di titik-titik kepadatan penduduk mengenai jadwal angkutan maupun tata cara pemilahan sampah. Data mengenai kondisi komunikasi di lapangan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Implementasi pada Dimensi Komunikasi

Indikator Komunikasi	Temuan Empiris di Lapangan (Hasil Pengamatan)	Dampak terhadap Kebijakan
Transmisi Pesan	Sosialisasi hanya dilakukan secara formal di tingkat kantor, kurang menyentuh media sosial atau pengumuman tingkat kelurahan secara intensif.	Masyarakat tetap membuang sampah tanpa jadwal yang teratur.
Kejelasan Pesan	Instruksi bersifat satu arah (pengangkutan saja), tanpa panduan teknis pemilahan sampah organik dan anorganik.	Terjadinya pencampuran sampah di TPS yang menyulitkan proses pemrosesan akhir.
Konsistensi	Informasi jadwal pengangkutan sering berubah-ubah di lapangan tanpa pemberitahuan dini kepada warga.	Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebersihan DLH.

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Uraian Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam indikator Transmisi Pesan, pengiriman informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah tidak mencapai seluruh lapisan masyarakat di wilayah perkotaan Buol. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pengumuman di tingkat RT/RW yang menyebabkan warga tidak mengetahui mekanisme pengurangan sampah dari sumber. Pada indikator Kejelasan Pesan, informasi yang disampaikan

pemerintah daerah cenderung ambigu karena hanya berisi larangan membuang sampah tanpa disertai petunjuk teknis mengenai jenis sampah yang bisa didaur ulang. Terakhir, pada indikator Konsistensi, peneliti menemukan adanya ketidaksinkronan jadwal angkutan sampah harian yang menyebabkan masyarakat sering kali menaruh sampah di pinggir jalan pada waktu yang salah, sehingga

tumpukan sampah terlihat sepanjang hari di wilayah perkotaan.

Temuan ini jika disandingkan dengan Teori George C. Edwards III membuktikan dimana yang menjadi penentu keberhasilan yakni komunikasi yang mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Di Kabupaten Buol, ketiga unsur ini belum terpenuhi secara kolektif, terutama pada aspek kejelasan dan konsistensi kepada publik. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Siti, Susanti, dan Hamid (2024) di Kota Palu serta Prayudha dan Rajab (2025) yang menyatakan bahwa kegagalan komunikasi publik merupakan hambatan utama dalam implementasi kebijakan persampahan di daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Secara teoritis, hambatan komunikasi ini menciptakan misperception di masyarakat, di mana sampah dianggap sepenuhnya sebagai tanggung jawab DLH tanpa adanya kewajiban partisipatif dari rumah tangga. Senada dengan Manalu et al. (2022) bahwa kebijakan lingkungan yang bersifat top-down tanpa komunikasi dua arah yang efektif cenderung menghasilkan partisipasi masyarakat yang rendah. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan sampah di perkotaan Buol akan sulit tercapai selama DLH belum memperbaiki kanal komunikasi yang lebih inklusif dan konsisten kepada masyarakat.

Dari sudut ekonomi pembangunan, komunikasi yang lemah meningkatkan biaya transaksi kebijakan. Ketidakjelasan jadwal dan

tata cara pemilahan menyebabkan rumah tangga tidak dapat menyesuaikan perilaku, meningkatkan pencampuran sampah, dan memperbesar biaya pengangkutan serta pemrosesan akhir. Komunikasi publik yang konsisten dapat mengubah rumah tangga dari penerima layanan pasif menjadi pelaku pengurangan sampah dan pemasok bahan bernilai ekonomi bagi kegiatan daur ulang.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya merupakan hambatan paling krusial bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buol dalam merespons lonjakan timbunan sampah. Berdasarkan data lapangan, rasio antara jumlah armada pengangkut dengan volume sampah yang mencapai 54.982 ton pertahun menunjukkan ketimpangan yang sangat tajam. Peneliti mengamati bahwa banyak sampah di wilayah perkotaan Kecamatan Biau tidak terangkut tepat waktu dikarenakan keterbatasan jumlah truk sampah yang beroperasi, ditambah dengan kondisi beberapa unit kendaraan yang sering mengalami kerusakan teknis. Selain sumber daya fisik, keterbatasan anggaran operasional juga menghambat penambahan tenaga kebersihan lapangan dan pemeliharaan alat berat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Data mengenai kondisi sumber daya di lapangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Analisis Implementasi pada Dimensi Sumber Daya

Indikator Sumber Daya	Temuan Empiris di Lapangan (Hasil Pengamatan)	Dampak terhadap Kebijakan
Sumber Daya Manusia	Jumlah petugas kebersihan lapangan tidak bertambah meski volume sampah melonjak 150%.	Beban kerja petugas berlebih dan cakupan layanan area perkotaan tidak merata.
Fasilitas Fisik	Keterbatasan jumlah truk angkut dan alat berat di TPA yang sering mengalami kerusakan.	Terjadinya penumpukan sampah di TPS selama sehari-hari.

Sumber Daya Finansial	Alokasi anggaran operasional BBM dan pemeliharaan alat sangat terbatas.	Terhambatnya mobilitas armada dan rendahnya frekuensi pengangkutan sampah.
-----------------------	---	--

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, pada indikator Sumber Daya Manusia, peneliti menemukan bahwa DLH Buol kekurangan personel lapangan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, sehingga pengawasan di titik-titik rawan sampah menjadi lemah. Pada indikator Fasilitas Fisik, ketergantungan pada armada yang sudah berumur tua menyebabkan proses pengangkutan tidak dapat dilakukan secara maksimal setiap hari, yang secara langsung menyebabkan skor infrastruktur persampahan di Buol berada pada angka rendah yakni 2,33. Selanjutnya, pada indikator Sumber Daya Finansial, keterbatasan dana mengakibatkan ketidakmampuan instansi untuk melakukan inovasi teknologi pengolahan sampah maupun pengadaan sarana baru, sehingga pola pengelolaan sampah di Buol masih bersifat konvensional.

Secara teoritis, temuan ini sangat relevan dengan Teori George C. Edwards III yang menempatkan sumber daya sebagai faktor penyokong utama keberhasilan implementasi; tanpa staf yang cukup dan fasilitas yang memadai, perintah kebijakan tidak akan pernah terlaksana dengan efektif meskipun dikomunikasikan dengan baik. Kondisi di Kabupaten Buol ini mengonfirmasi hasil penelitian Edrial, Ramdani, dan Salahuddin (2025) di Kabupaten Sumbawa yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara sarana pengangkutan dan volume sampah harian adalah penyebab utama kegagalan layanan kebersihan.

Lebih lanjut, hasil ini juga selaras dengan penelitian Radhi, Raudah, dan Jumaidi (2025) yang menekankan bahwa minimnya alokasi

anggaran untuk upah dan operasional merupakan penghambat sistemik di tingkat kabupaten dalam mengelola isu lingkungan perkotaan. Sesuai dengan pendapat Sakir (2023), manajemen persampahan daerah memerlukan komitmen anggaran yang proporsional dengan laju pertumbuhan sampah. Dengan demikian, rendahnya kapasitas sumber daya di DLH Kabupaten Buol saat ini merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara jangka panjang, sehingga diperlukan adanya re-alokasi anggaran yang lebih memihak pada sektor lingkungan.

Keterbatasan armada, tenaga, dan anggaran menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan aktivitas perkotaan dan kapasitas infrastruktur pelayanan. Dalam ekonomi pembangunan, kondisi ini mengurangi efisiensi belanja publik karena anggaran terserap untuk penanganan reaktif dan perbaikan kerusakan, bukan untuk investasi pencegahan, pemilahan, dan pengolahan. Reorientasi anggaran perlu diarahkan pada sarana 3R, peremajaan armada, sistem informasi rute, dan kemitraan pengolahan yang berpotensi menghasilkan nilai tambah ekonomi lokal.

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Sikap dan komitmen para pelaksana di DLH Kabupaten Buol terhadap kebijakan penanganan sampah berada pada tingkat yang cukup baik secara administratif, namun masih bersifat reaktif. Peneliti menemukan bahwa meskipun petugas memiliki kemauan kerja yang tinggi, disposisi mereka cenderung hanya terbatas pada pemenuhan tugas rutin

pengangkutan sampah tanpa adanya inisiatif untuk melakukan edukasi atau penindakan terhadap pelanggaran di lapangan. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa petugas lapangan sering kali memaklumi tumpukan sampah liar di area perkotaan

selama titik protokol sudah terlihat bersih, yang menandakan bahwa pemahaman substansial mengenai tujuan pengurangan sampah belum sepenuhnya terinternalisasi. Data mengenai kondisi disposisi pelaksana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Analisis Implementasi pada Dimensi Disposisi

Indikator Disposisi	Temuan Empiris di Lapangan (Hasil Pengamatan)	Dampak terhadap Kebijakan
Kognisi (Pemahaman)	Pelaksana memahami tugas pengangkutan, namun kurang memahami target jangka panjang pengurangan sampah (3R).	Kebijakan hanya berjalan di sektor hilir (pembuangan) tanpa pengelolaan di hulu.
Respons Pelaksana	Petugas cenderung bersikap reaktif terhadap tumpukan sampah, hanya bergerak jika ada keluhan masif dari warga.	Penanganan sampah tidak terencana secara sistematis dan berkelanjutan.
Intensitas Komitmen	Komitmen kerja tinggi di tengah keterbatasan fasilitas, namun mulai mengalami demotivasi akibat beban kerja berlebih.	Penurunan kualitas layanan pengangkutan sampah secara periodik.

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, pada indikator Kognisi, terdapat celah antara pemahaman regulasi dengan praktik di lapangan; pelaksana di DLH Buol lebih memprioritaskan "kota bersih" secara visual daripada "sampah terkelola" secara sistematis sesuai UU No. 18 Tahun 2008. Pada indikator Respons Pelaksana, ditemukan bahwa pola kerja masih sangat bergantung pada instruksi pimpinan atau keluhan masyarakat, sehingga pencegahan terhadap penumpukan sampah liar di Kecamatan Biau sering kali terlambat dilakukan. Sementara pada indikator Intensitas Komitmen, peneliti mengamati adanya kelelahan fisik dan mental dari petugas lapangan akibat lonjakan sampah tahun 2024 yang tidak dibarengi dengan penambahan insentif atau tenaga bantuan, sehingga

semangat kerja mulai menunjukkan tren penurunan.

Secara teoritis, temuan ini sangat relevan dengan Teori George C. Edwards III yang menyatakan bahwa disposisi mencakup kecenderungan dan karakteristik pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Jika pelaksana tidak memiliki sikap yang sesuai dengan tujuan kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik di Kabupaten Buol, disposisi petugas masih terjebak dalam paradigma "kumpul-angkut-buang". Kondisi ini selaras dengan penelitian Ali (2025) di Kota Baubau yang mengungkapkan bahwa disposisi yang hanya terpaku pada SOP dasar tanpa diikuti kesadaran lingkungan akan menyebabkan kebijakan persampahan kehilangan esensinya.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Edrial et al. (2025) bahwa ketiadaan sanksi yang tegas (disposisi penegakan hukum) membuat pelaksana di daerah cenderung pasif dalam menghadapi pelanggaran masyarakat. Sesuai dengan pandangan Sakir (2023), kepemimpinan dan karakter pelaksana sangat menentukan keberhasilan manajemen persampahan di daerah dengan fiskal terbatas. Dengan demikian, meskipun terdapat komitmen moral dari pelaksana di DLH Kabupaten Buol, tanpa adanya perubahan paradigma disposisi dari sekadar "petugas pengangkut" menjadi "agen pengelola lingkungan", implementasi kebijakan ini akan terus menghadapi kendala efektivitas di masa mendatang.

Paradigma kumpul-angkut-buang membatasi potensi ekonomi sampah karena seluruh material diperlakukan sebagai residu, bukan sebagai sumber daya. Transformasi disposisi pelaksana menuju pengurangan dari sumber dan ekonomi sirkular penting untuk mendorong inovasi pelayanan, pemberdayaan kelompok masyarakat, pengembangan bank sampah, serta keterlibatan UMKM daur ulang dan kompos.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian pada dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buol telah memiliki kerangka organisasi yang jelas berdasarkan peraturan daerah, namun masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi dan pembagian otoritas yang kaku. Peneliti menemukan bahwa meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengangkutan sampah sudah tersedia, implementasinya di wilayah perkotaan Kecamatan Biau sering terhambat oleh fragmentasi tanggung jawab antara DLH dengan pemerintah kelurahan. Pengamatan peneliti menunjukkan adanya tumpang tindih area pelayanan di wilayah pesisir, di mana batasan kewenangan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penanganan sampah di luar jalan protokol seringkali menjadi perdebatan administratif, sehingga mengakibatkan tumpukan sampah liar tidak tertangani dengan cepat. Data mengenai kondisi struktur birokrasi di lapangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Analisis Implementasi pada Dimensi Struktur Birokrasi

Indikator Struktur Birokrasi	Temuan Empiris di Lapangan (Hasil Pengamatan)	Dampak terhadap Kebijakan
SOP (Standar Prosedur)	Tersedia secara formal namun kurang fleksibel terhadap lonjakan volume sampah yang mendadak.	Pelaksanaan tugas di lapangan menjadi kaku dan lambat dalam merespons krisis sampah.
Fragmentasi Otoritas	Adanya pembagian wilayah kerja yang tidak sinkron antara DLH, Kecamatan, dan Kelurahan.	Terjadinya kekosongan layanan di area pemukiman padat penduduk.
Koordinasi Antar-Unit	Hubungan kerja antar-instansi masih bersifat formalistik dan minim kolaborasi lapangan secara intensif.	Penanganan sampah liar memerlukan waktu birokrasi yang lama karena masalah ego sektoral.

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4, pada indikator SOP, peneliti menemukan bahwa prosedur yang ada di DLH Buol belum mampu mengakomodasi perubahan data timbulan sampah tahun 2025 yang melonjak drastis, sehingga mekanisme pengangkutan tetap menggunakan pola lama yang sudah tidak relevan. Pada indikator Fragmentasi Otoritas, terlihat bahwa kebijakan pengelolaan sampah terpecah ke dalam beberapa unit kerja tanpa adanya integrasi komando yang kuat, yang mengakibatkan ketidakjelasan tanggung jawab pada titik-titik pemukiman pesisir. Selanjutnya, pada indikator Koordinasi Antar-Unit, pengamatan peneliti mengonfirmasi bahwa lemahnya sinergi antara aparat kelurahan dan petugas DLH menyebabkan program pemberdayaan masyarakat seperti Bank Sampah tidak berjalan optimal karena tidak adanya dukungan struktural yang menyatu.

Secara teoritis, temuan ini sangat relevan dengan Teori George C. Edwards III yang menekankan bahwa dua karakteristik utama struktur birokrasi yang memengaruhi implementasi adalah SOP dan fragmentasi. Di Kabupaten Buol, fragmentasi otoritas menjadi penghambat karena memecah tanggung jawab pengelolaan sampah ke dalam unit-unit yang tidak terkoordinasi dengan baik. Kondisi ini selaras dengan hasil penelitian Takaluhude, Gosal, dan Kasenda (2022) di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mengungkapkan bahwa ketidakserasian antara pelaksanaan program di tingkat dinas dengan tingkat kelurahan merupakan kendala struktural yang fatal dalam manajemen sampah daerah.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga didukung oleh temuan Sulaiman (2023) di wilayah Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif di daerah sering kali terhambat oleh struktur birokrasi yang kaku dan tertutup. Sesuai dengan pandangan Aditya, Nurdin, dan Asropi (2025), efektivitas implementasi kebijakan di wilayah perkotaan memerlukan struktur organisasi yang lebih

adaptif dan integratif. Dengan demikian, kelemahan struktur birokrasi di DLH Kabupaten Buol saat ini memerlukan restrukturisasi koordinasi yang lebih cair, terutama dalam menjembatani peran pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan agar lonjakan timbulan sampah dapat ditangani secara kolektif.

Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Temuan pada empat dimensi menunjukkan bahwa kelemahan implementasi kebijakan sampah berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Buol. Penumpukan sampah menurunkan kualitas lingkungan perkotaan, meningkatkan risiko gangguan kesehatan, mengurangi kenyamanan kawasan perdagangan dan permukiman, serta dapat menekan produktivitas masyarakat. Di sisi fiskal, pola penanganan reaktif memperbesar kebutuhan biaya operasional tanpa menghasilkan pengurangan timbulan yang berkelanjutan.

Sebaliknya, pengelolaan berbasis ekonomi sirkular dapat menciptakan rantai nilai lokal melalui pemilahan, pengumpulan material, pengomposan, daur ulang, dan pemasaran produk olahan. Bank sampah dapat berfungsi sebagai instrumen inklusi ekonomi rumah tangga, sedangkan kemitraan pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha dapat membuka lapangan kerja hijau. Dengan demikian, kebijakan sampah perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan, dan agenda pengurangan kemiskinan.

PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan

Hidup di wilayah perkotaan Kabupaten Buol belum berjalan dengan baik atau belum efektif karena adanya hambatan sistemik pada empat dimensi utama implementasi. Secara kritis, peneliti menemukan bahwa kegagalan pencapaian target kebijakan dipicu oleh komunikasi yang hanya bersifat administratif-internal tanpa menyentuh aspek edukasi publik, serta krisis sumber daya yang sangat timpang dibandingkan dengan lonjakan timbulan sampah tahun 2025 yang mencapai 150 persen. Meskipun para pelaksana memiliki komitmen kerja yang tinggi, namun disposisi yang bersifat reaktif dan struktur birokrasi yang masih mengalami fragmentasi otoritas antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak kelurahan menyebabkan penanganan sampah di kawasan padat penduduk Kecamatan Biau menjadi lambat dan tidak terintegrasi. Dengan demikian, efektivitas kebijakan saat ini masih terjebak pada paradigma pembuangan sampah konvensional dan belum mampu mentransformasi perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan sesuai amanat regulasi nasional.

Dalam lingkup ekonomi pembangunan, ketidakefektifan tersebut menimbulkan biaya sosial, mengurangi efisiensi pelayanan publik, dan menghambat pemanfaatan sampah sebagai sumber nilai tambah. Pengelolaan sampah perlu diarahkan dari pendekatan hilir menuju sistem pengurangan dari sumber, 3R, dan ekonomi sirkular agar berkontribusi pada peningkatan produktivitas wilayah, penciptaan kerja hijau, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Buol disarankan untuk segera melakukan restrukturisasi strategi komunikasi dengan memanfaatkan kanal digital dan kolaborasi tingkat RT/RW guna menciptakan kesadaran partisipatif di tingkat rumah tangga. Rekomendasi mendesak lainnya adalah perlunya re-alokasi anggaran untuk modernisasi armada pengangkutan serta penambahan personel lapangan guna mengimbangi beban kerja akibat lonjakan volume sampah di wilayah perkotaan. Selain

itu, diperlukan pembentukan unit koordinasi lintas sektor yang lebih fleksibel untuk menghilangkan ego sektoral antara dinas dan kelurahan dalam mengelola sampah di wilayah pesisir. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lokus penelitian yang hanya berfokus pada wilayah perkotaan, sehingga untuk penelitian yang akan datang, disarankan untuk memperluas cakupan analisis pada wilayah perdesaan atau mengeksplorasi strategi tata kelola kolaboratif yang melibatkan pihak swasta dalam skema investasi infrastruktur persampahan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, C., Nurdin, N., & Asropi. (2025). Strategi implementasi pengelolaan persampahan Jakarta. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 7(1), 101-118.
- Afandi, Mangngasing, N., & Nuraisyah. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu (Studi pengelolaan sampah di Kelurahan Tondo). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 769-781.
- Al-Giffari, M. H., Yudana, G., & Suminar, L. (2023). Dukungan kinerja pengelolaan sampah terhadap kesesuaian penerapan konsep keberlanjutan lingkungan di Kota Mataram. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 5(1), 118-132.
- Ali, Y. D. A., Asmiddin, & Ramadhan, S. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan rumah tangga di Kota Baubau. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 11(2), 93-103.
- Almaysuri, F. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Basri, I. S., Arifin, R., Akhmad, A. G., Romanda, R., & Salenda, H. (2025). Evaluasi dan arahan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman: Studi kasus permukiman pesisir perkotaan Kelurahan Buol, Kabupaten Buol. *RUANG: JURNAL ARSITEKTUR*, 19(2), 19-36.

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. (2024). Data laporan pengolahan sampah 2024. Diperoleh dari https://dlh.sultengprov.go.id/deploy/pdf/1757485404_1ee35cca241ce263178c.pdf.
- Edrial, Ramdani, M. L., & Salahuddin, M. (2025). Implementasi Peraturan Bupati No 46 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 6(1), 486-493.
- Erlianti, G., Wahyuni, N., Bunda, A. M., Falatehan, I. J., Maulana, I., & Ihsan, S. (2025). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah anorganik melalui media plang edukatif di Nagari Dilam, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 18148-18155.
- Hafizah, H., Dharma, A. S., & Paulina, S. (2025). Implementasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus Desa Harus dan Harusan). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 127-139.
- Junaidi, A. K. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang urgensi pengadaan tempat sampah di Desa Tegalweru. *Malang Interdisciplinary Journal*, 2(11), 1485-1492.
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285-292.
- Namira, F., & Azhar, A. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Muara Enim berdasarkan teori Edwards III. *Perspektif*, 14(4), 853-862.
- Prayudha, R., & Rajab, R. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. *Bappenas Working Papers*, 8(1), 59 - 73.
- Radhi, M., Raudah, S., & Jumaidi. (2025). Efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(2). 757-766.
- Sakir, A. R. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 1-12.
- Siti, H., Susanti, A., & Hamid, A. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. *JPS: Journal of Publicness Studies*, 1(3), 73-80.
- Sulaiman, M. C. (2023). Collaborative governance dalam penanganan masalah sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor.
- Takaluhude, S. A., Gosal, R., & Kasenda, V. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna. *Jurnal Governance*, 2(2). 1-14.
- Tiyansyah, N. A., & Rahayu, R. K. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang tahun 2022-2023. *Journal of Governance and Policy*, 5(1), 50-67.